

ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKAYANG DALAM MENGURANGI DAN MENCEGAH STUNTING

Oleh:

DENY HERTIAN^{1*}

NIM. E.1012161027

Martoyo², Aliyah Nur'aini Hanum²

*Email: denyhertian@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Prograam Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Tujuan penelitian mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang dalam mengurangi dan mencegah stunting. Metode penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah ahli gizi pemegang program stunting di Dinas Kesehatan, ahli gizi di Puskesmas Bengkayang, dan orang tua balita stunting. Penelitian ini menggunakan teori Bintoro Tjokroadmidjoyo (1996:57)-58) yang terdiri dari: 1) Pengorganisasian tahap yang mana lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan dan siapa yang menjadi pelakunya, penetapan anggaran serta penetapan sarana prasaran yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. 2) Interpretasi tahap penjabaran suatu kebijakan. Interpretasi diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan agar seluruh masyarakat dapat memahami apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari kebijakan yang dibuat. Suatu kebijakan yang telah dibuat tidak akan mencapai tujuan jika terdapat perbedaan pemahaman latar pelaksanaan kebijakan atau sasaran kebijakan, karenanya suatu kebijakan harus di pahami dengan baik oleh para implementor agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk melihat bagaimana interpretasi suatu kebijakan dapat diketahui dengan pemahaman para implementor maupun sasaran kebijakan dan sosialisasi program. 3) Penerapan merupakan proses akhir dari implementasi kebijakan yang telah disusun sebelumnya, petunjuk dalam penerapannya harus sesuai dengan SOP yang jelas, pada tahapan ini tentunya perlu diketahui oleh berbagai pihak yang terlibat terutama dalam melaksanakan kegiatan penurunan stunting. Saran dari penelitian ada keterkaitan antar Dinas Lingkungan Hidup sehingga dapat membantu masyarakat dalam memberikan penyuluhan sanitasi dan bantuan membangun sanitasi yang baik sehingga menjadi lingkungan yang bersih.

Kata kunci: Pelaksanaan, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Stunting

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Stunting menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya resiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental (Lewit, 1997; Kusharisupeni, 2002; Unicef, 2013). *Stunting* merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan (*growth faltering*) akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Keadaan ini dipengaruhi dengan tidak terimbangnya kerja tubuh (*catch up growth*) yang memadai. Indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi balita *stunting* adalah berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) menurut standar WHO *child growth standard* dengan kriteria *stunting*. Periode 0-24 bulan merupakan periode yang menentukan kualitas kehidupan sehingga disebut dengan periode emas. Periode ini merupakan periode yang sensitif karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifat permanen dan tidak dapat dikoreksi. Untuk itu dibutuhkan pemenuhan gizi yang kuat pada usia ini.

Pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap masalah penyelenggaraan

kesehatan dalam rangka pembangunan masyarakat yang sehat. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Bab V Pasal 11 yang dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan melalui banyak kegiatan seperti kesehatan keluarga, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta penyuluh kesehatan. Penyakit yang menjadi sasaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit *Stunting*.

Pencegahan dan penanggulangan *stunting* membutuhkan upaya yang bersifat holistic dan saling terintegrasi. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 merupakan salah satu strategi dalam *Scaling Up Nutrition (SUN)* dengan melibatkan berbagai sektor yang harus disikapi dengan koordinasi yang kuat baik di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Diseminasi informasi dan advokasi kepada stakeholder dan pemangku kepentingan lain diberbagai lintas sektor pada tingkatan yang sama dan perlu dilakukan upaya pelatihan dan edukasi untuk jajaran struktural agar mampu menjelaskan dan melakukan pemberdayaan dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Selanjutnya, intervensi penting penguatan

1000 HPK yang menjadi bagian dari budaya di kehidupan sosial masyarakat, melakukan kursus singkat dalam pengetahuan dan pendidikan kepada ibu sebelum kehamilan atau sebelum menjadi pengantin (calon pengantin) sebagai bekal ibu dalam kehamilan untuk menjaga tumbuh kembang kognitif janin yang dimulai dari trimester pertama dalam pembentukannya (Aryastami, 2017).

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Bengkayang tahun 2019 masih memiliki 3515 orang balita yang mengalami *stunting*. Dari tabel 1.1 di atas menggambarkan status indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) pada balita masih banyak terdapat tinggi yang sangat pendek mencapai 13,571% dan pendek mencapai 14,16%. Kecamatan Samalantan terdapat status *stunting* dengan jumlah yang sangat tinggi, yaitu mencapai 509 orang balita. Sehingga menjadi kecamatan yang diprioritaskan penanggulangan *stunting*.

Pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah menetapkan 100 kabupaten/kota prioritas penanggulangan *stunting*. Daerah prioritas atau daerah yang menjadi lokasi utama intervensi (campur tangan suatu lembaga) *stunting* tinggi adalah daerah yang memiliki angka prevalensi (jumlah orang dalam populasi

yang mengalami penyakit) *stunting* tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini berkaitan dengan anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan *stunting*. Daerah prioritas penanggulangan *stunting* memiliki anggaran khusus yang memang diperuntukkan bagi program-program percepatan dan pencegahan *stunting*.

Adapun kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang dalam mengurangi dan mengatasi penyakit *stunting* yang telah dilakukan pada tahun 2019 antara lain:

- A. Kampanye *stunting* bagi semua kepala desa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Puskesmas, dan petugas gizi yang berada di seluruh Kecamatan wilayah Kabupaten Bengkayang
- B. Pelatihan bagi petugas gizi di 9 puskesmas yang berada di Kabupaten Bengkayang seperti Pelatihan Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA)
- C. Pelatihan OJT PMBA bagi kader di Desa pada 9 Kecamatan
- D. Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bagi petugas kesehatan lingkungan puskesmas di 9 Kecamatan.
- E. Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM di setiap Desa.

Melihat kenyataan mengenai tingginya jumlah kasus *stunting* di Kabupaten Bengkayang dan bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang dalam mengurangi dan mencegah *stunting*, apakah benar sudah turun kelapangan dan apakah sudah semua kecamatan diberikan pelatihan dan pemberian informasi tentang pentingnya mengetahui gejala *stunting*, menjaga kebersihan dan pola asuh yang benar sejak dini, maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang dalam mengurangi dan mencegah *stunting*.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Bengkayang masih banyak memiliki balita yang mengalami masalah anak pendek (*stunting*)
2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang dalam mengurangi dan mencegah *stunting*

3. Fokus Penelitian

Mencermati permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah

dan identifikasi masalah diatas, maka penulis memfokuskan pada: Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang dalam mengurangi dan mencegah *stunting* di Kabupaten Bengkayang.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah Bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang dalam mengurangi dan mencegah *stunting*?

5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang dalam mengurangi dan mencegah *stunting*.

6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memahami arti penting adanya pelaksanaan tugas dan fungsi disuatu lembaga dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai tugas dan fungsi di suatu lembaga.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan evaluasi untuk meningkatkan profesionalisme pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang. Dan diharapkan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bengkayang dan peneliti lain.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Konsep

Menurut Lijan Poltak S (2006:5), istilah publik berasal dari bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, dan negara. Kata public sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak dan ramai. Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan diatas, maka public dapat didefinisikan sebagai masyarakat luas atau umum.

2. Teori

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.10 Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :

- a) Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- b) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses

dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

- c) Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
- d) Menurut Harsono (2002:67) pelaksanaan adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.
- e) Menurut Guntur Setiawan (2004:39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif.
- f) Menurut Majone dan Wildavky dalam Nurdin Usman (2002:70) pelaksanaan merupakan evaluasi

atau perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dilakukan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu dimulainya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengembalian keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

- g) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Pengorganisasian adalah tahap pengorganisasian yang mana lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang meenjadi pelaksana kebijakan dan siapa yang menjadi pelakunya, penetapan anggaran serta penetapan sarana prasaran yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.
2. Interpretasi adalah tahap penjabaran suatu kebijakan atau pemahaman mengenai suatu kebijakan. Interpretasi diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan (sosialisasi) kebijakan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari kebijakan yang dibuat. Suatu kebijakan yang telah dibuat tidak akan mencapai tujuan jika terdapat perbedaan pemahaman latar pelaksanaan kebijakan atau sasaran kebijakan, karenanya suatu kebijakan harus dipahami dengan baik oleh para implementor agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk melihat bagaimana interpretasi suatu kebijakan dapat diketahui dengan pemahaman para implementor maupun sasaran kebijakan dan sosialisasi program.
3. Penerapan adalah tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan realitas nyata. Aktivitas aplikasi

merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada. Penerapan merupakan proses atau tahapan akhir dari implementasi kebijakan yang telah disusun sebelumnya, petunjuk dalam penerapannya juga haruslah sesuai dengan SOP yang jelas, pada tahapan ini tentunya perlu diketahui oleh berbagai pihak yang terlibat terutama dalam melaksanakan kegiatan penurunan stunting.

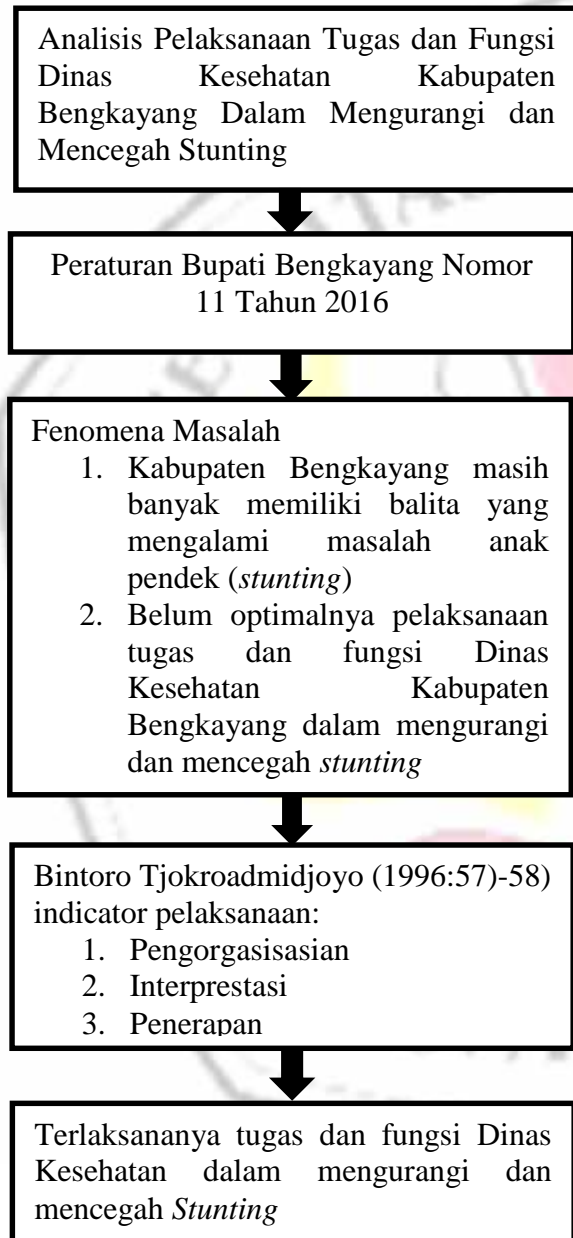
Ketiga program diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor lainnya.

Keempat program diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu factor lainnya. Selain itu proses implementasi sekuran-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;

- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perseorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Kerangkapiikiran penelitian



Sumber: Peneliti 2021

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif dan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini menggambarkan suatu gejala sosial tertentu berdasarkan data dan fakta. Didalam penelitian deskriptif (Ismanto Setyabudi, 2015:5) mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.

Adapun penelitian kualitatif dalam (Ismanto Setyabudi, 2015:4), yaitu lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha

menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian deskripsi kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu peristiwa apa adanya atau sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Oleh karena itu dalam penelitian ini berfokus pada Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang dalam mengurangi dan mencegah *stunting*.

Adapun subjek penelitian ini adalah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan tingginya *stunting* di Kabupaten Bengkayang dan memiliki sumber-sumber informasi yang dibutuhkan oleh peneliti baik itu berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* yakni menentukan sumber informasi untuk tujuan tertentu saja. Yaitu orang yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui permasalahan terkait masalah tingginya angka *stunting* adapun subjek penelitian ini adalah

1. Ahli gizi seksi kesehatan keluarga dan gizi bidang kesehatan masyarakat di Puskesmas Kecamatan Bengkayang.
2. Ahli gizi seksi kesehatan keluarga dan gizi bidang kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang
3. Ibu Yeni, Ibu Hasanah dan Ibu Siti Fatimah selaku orang tua anak stunting di Kabupaten Bengkayang.

Objek dalam penelitian ini adalah analisis pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang dalam mengurangi dan mencegah *stunting*. Teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Teknik keabsahan data dibutuhkan teknik pemeriksaan atau keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian sebaliknya data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Triangulasi merupakan salah satu proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek keabsahan informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian. Triangulasi sumber data adalah untuk

menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, data dari beberapa sumber tersebut nantinya dideskripsikan, dikategorisasikan mana pandangan yang sama atau yang berbeda dan mana yang spesifik. Setelah mengambil kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber-sumber data tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, display data dan verifikasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian yang mana lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan dan siapa yang menjadi pelakunya, penetapan anggaran serta penetapan sarana prasaran yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian wawancara di atas di peroleh informasi tugas dan fungsi dalam upaya mengurangi dan mencegah stunting, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang sudah dilaksanakan, seperti memberikan pembinaan dalam peningkatan status gizi masyarakat, pembinaan dalam peningkatan pengetahuan gizi masyarakat, pembinaan pencegahan stunting,

melaksanakan strategi promosi kesehatan, peningkatan surveilans gizi, penguatan intervensi suplementasi gizi pada ibu hamil, penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis, penyediaan makanan tambahan bagi balita kekurangan gizi, suplementasi gizi mikro, pembinaan dalam peningkatan persalinan di fasilitasi pelayanan kesehatan pembinaan pelaksanaan stmb, dan memberikan layanan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan. Dan pihak puskesmas setiap bulannya ada pemberian pmt untuk orang tua stunting.

2. Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan tahap penjabaran suatu kebijakan atau pemahaman mengenai suatu kebijakan. Interpretasi diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan (sosialisasi) kebijakan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari kebijakan yang dibuat. Suatu kebijakan yang telah dibuat tidak akan mencapai tujuan jika terdapat perbedaan pemahaman antar pelaksana kebijakan atau sasaran kebijakan. karenanya suatu kebijakan harus dipahami dengan baik oleh para implementor agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk melihat bagaimana interpretasi suatu kebijakan dapat diketahui

dengan pemahaman para implementor maupun sasaran kebijakan dan sosialisasi program. Berdasarkan hasil penelitian wawancara bahwa sudah dilakukan program gizi untuk mengurangi dan mencegah stunting dengan melaksanakan kampanye asi eksklusif tahun 2017 dan telah menunjuk duta asi eksklusif juga, kemudian melakukan kampanye stunting tahun 2019 dan telah menunjuk duta stunting yang mana di hadiri oleh 122 desa dan 2 kelurahan, kemudian memberikan pelatihan PMBA (pemberian makan anak) bagi bidan, ahli gizi, dan kader posyandu di 9 Kecamatan, yaitu Kecamatan Teriak, Kecamatan Sui Betung, Kecamatan Lembah Bawang, Kecamatan Ledo, Kecamatan Sanggau Ledo, Kecamatan Tujuh Belas, Kecamatan Seluas, Kecamatan Monterado, dan Kecamatan Sui Raya Kepulauan. Dan yang terakhir dengan memberikan pelatihan pemucuan STMB (sanitasi total berbasis masyarakat) bagi tim kecamatan dan tim desa di 9 kecamatan, yang bertujuan meningkatkan kemampuan peserta pelatihan untuk melakukan pemucuan santasi di masyarakat sehingga mempunyai jamban di rumah sendiri.

3. Penerapan

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi

kebijakan realitas nyata. Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada (Widodo, 2010:89). Penerapan merupakan proses atau tahapan akhir dari implementasi kebijakan yang telah disusun sebelumnya, petunjuk dalam penerapannya juga haruslah sesuai dengan SOP yang jelas, pada tahapan ini tentunya perlu diketahui oleh berbagai pihak yang terlibat terutama dalam melaksanakan kegiatan penurunan stunting. Berdasarkan hasil penelitian wawancara bahwa dalam menjalankan program penurunan stunting sudah berjalan dengan lancar, tetapi partisipasi warga tidak seluruhnya yang datang ke posyandu jadi susah untuk menentukan mana yang benar - benar aktif dalam pemantauan warga yang ikut aktif dalam penyuluhan program stunting di puskesmas-puskesmas di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Kabupaten Bengkayang mengenai Pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mengurangi dan

mencegah stunting, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengorganisasian

Ada beberapa program yang dilakukan dalam penurunan stunting di Kabupaten Bengkayang melalui kampanye asi eksklusif tahun 2017 dan telah menunjuk duta asi eksklusif, kemudian melakukan kampanye stunting tahun 2019 dan telah menunjuk duta stunting yang mana di hadiri oleh 122 desa dan 2 kelurahan, kemudian memberikan pelatihan PMBA (pemberian makan anak) bagi bidan, ahli gizi, dan kader posyandu di 9 Kecamatan, yaitu Kecamatan Teriak, Kecamatan Sui Betung, Kecamatan Lembah Bawang, Kecamatan Ledo, Kecamatan Sanggau Ledo, Kecamatan Tujuh Belas, Kecamatan Seluas, Kecamatan Monterado, dan Kecamatan Sui Raya Kepulauan. Dan yang terakhir dengan memberikan pelatihan pemicuan STMB (sanitasi total berbasis masyarakat) bagi tim kecamatan dan tim desa di 9 kecamatan, yang bertujuan meningkatkan kemampuan peserta pelatihan untuk melakukan pemicuan santasi di masyarakat sehingga mempunyai jamban di rumah sendiri.

2. Interpretasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang secara

umum telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, tetapi masih belum maksimal dalam mensosialisasikan ke masyarakat yang tidak mengerti bagaimana cara penurunan stunting.

3. Penerapan

Dalam menjalankan program penurunan stunting sudah berjalan dengan lancar, tetapi partisipasi warga tidak seluruhnya yang datang ke posyandu jadi susah untuk menentukan mana yang benar - benar aktif dalam pemantauan warga yang ikut aktif dalam penyuluhan program stunting di puskesmas – puskesmas di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian analisis pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang dalam mengurangi dan mencegah stunting terdapat saran yang perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Pengorganisasian

Dengan adanya kegiatan Kampanye Pencegahan Stunting diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Upaya Pencegahan Stunting di Kabupaten Bengkayang. Dan pentingnya peran aktif Pemerintah dan tenaga kesehatan dalam penurunan stunting pada balita.

2. Interpretasi

Program sosialisasi yang dilakukan terkait stunting harus diperbaiki agar semua kalangan masyarakat mengetahui stunting baik proses dan pencegahannya maupun penanggulangannya, masyarakat untuk menerapkan pola makan gizi seimbang dan mendapatkan pelayanan dan pendidikan yang layak untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan kerjasama antar dinas di Kabupaten Bengkayang perlu ditingkatkan agar program penurunan stunting dapat berjalan dengan baik.

3. Penerapan

Intervensi penurunan stunting harus dilakukan diseluruh desa yang ada di Kabupaten Bengkayang karena tidak menutup kemungkinan akan ada anak stunting didesa lainnya, pelatihan-pelatihan kepada kader harus lebih diberi pemahaman yang benar dan dilatih dengan yang ahli atau dari pusat sehingga kader

lebih mengetahui dan paham soal penurunan stunting.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Buku *Panduan Penyusunan Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura 2017.

Bintoro Tjokroamidjojo. 1978. *Pengantar Administrasi Pembangunan* : LP3ES

Browne dan Wildavsky. 2004. (dalam Nurdin dan Usman,2004:70)

Dunn N. Wiliam. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Graha Gajah Mada University Press: Yogyakarta.

Harsono. 2002. *Implementasi Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.

Kusharisupeni. 2002. *Peran Status Kelahiran terhadap Stunting pada Bayi* : Sebuah Studi Prospektif. Jurnal Kedokteran Trisakti

Moekijat. 1998. *Analisis jabatan*. Bandung : Mandar Maju

Nining Haslinda Zainal. 2008. *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin : Skripsi.

Setiawan. Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Siagian, Sondang P. 2009. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta : Rineka Cipta

Suharno. 2010. *Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks implementasi Berbasis Kurikulum*. Kencana: Jakarta

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Perindo: Yogyakarta.

Undang-Undang:

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Peraturan Gubernur Nomor 49 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Bab V Pasal 11.

Skripsi:

Albertus. 2016. “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Aparatur di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat”. Laporan Akhir. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.

Retno Wahyuniarti. 2016. “Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Kesehatan Keluarga Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat”. Laporan Akhir. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.